

RANCANGAN

RENCANA KERJA

KECAMATAN JABON
TAHUN 2025

Jl. Majapahit No. 1
Dukuhsari –
Kecamatan Jabon





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN JABON
Jalan Majapahit No 01 Dukuhsari Jabon
Telepon 0343852008
Email : kecamatanjabon01@gmail.com Website : sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JABON
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 000.7/11/438.7.17/2024
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JABON
TAHUN 2025

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bahwa Rencana Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paling lambat satu Bulan setelah Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);.
12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan- Mojokerto - Surabaya-Sidoarjo- Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pengesahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jabon Tahun 2025;
- KEDUA : Daftar Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jabon Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jabon Tahun 2025, yang telah disahkan dan menjadi Pedoman Kecamatan Jabon dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan Belanja Kegiatan Perangkat Daerah pada proses pembahasan DPRD, maka Renja Kecamatan Jabon Tahun 2025, akan disesuaikan dan ditetapkan kembali oleh Camat Jabon;
- KELIMA : Keputusan Camat Jabon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 10 Juli 2024
CAMAT JABON



Ditandatangani secara elektronik oleh

ISWADI PRIBADI, S.Sos, M.MT.
NIP. 197012081992011002

ISWADI PRIBADI, S.Sos, M.MT
Pembina Tk I / IV b
NIP.197012081992011002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rachmad serta karuniaNya sehingga Kecamatan Jabon dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun anggaran 2025.

Dalam Rencana Kerja Kecamatan Jabon berisikan rencana dan tindakan strategis yang memuat Program maupun Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jabon dalam tahun anggaran 2025. Rencana Kerja merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran kedepan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat, karena Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional dan dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Jabon dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan PD yang memuat kebijakan dan program / kegiatan / sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Jabon Tahun 2025 dan untuk mereview hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan perkiraan realisasi capaian Tahun Berjalan (Tahun 2025). Melalui Dokumen Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi insitusi baik Pemerintah, Masyarakat maupun Institusi terkait.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Jabon Tahun 2025 diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat terlaksana dengan optimal, tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya rencana kerja ini.



Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, oleh karena itu masukan serta saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Atas masukan serta saran yang positif dan membangun disampaikan terima kasih.

Sidoarjo, 10 Juli 2024
CAMAT JABON



Ditandatangani secara elektronik oleh

ISWADI PRIBADI, S.Sos, M.MT.
NIP. 197012081992011002

ISWADI PRIBADI, S.Sos, M.MT
Pembina Tk I / IV b
NIP.197012081992011002



DAFTAR ISI

COVER i

SK ii

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

 1.1.Latar Belakang 1

 1.2.Landasan Hukum 3

 1.3.Maksud dan Tujuan 6

 1.4.Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
 Perangkat Daerah 8

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .. 19

 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 19

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 39

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 40

 3.3 Program dan Kegiatan 40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43

BAB V PENUTUP 49

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Kecamatan Jabon ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota serta dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berbatasan. Oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Tahun 2025 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di Tingkat Pusat, dokumen perencanaan di Tingkat Provinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten di Sidoarjo sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu RKPD penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025, sehingga kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo adalah



menjembatani antara perencanaan strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan maupun program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementra (PAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jabon Tahun 2025 berisi kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan kegiatan - kegiatan pendukungnya, baik yang akan dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jabon mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh stakeholder baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Kecamatan Jabon, karena memuat seluruh kebijakan publik yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi pemerintah.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jabon Tahun 2025 dilengkapi dengan Lampiran yang berisi uraian tentang program dan kegiatan beserta Indikasi Pagu untuk masing-masing Program.

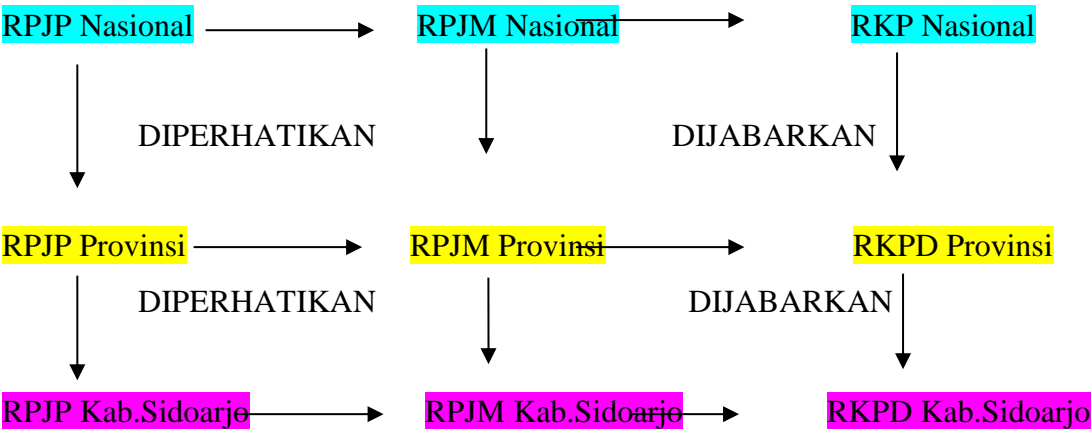
Adapun tata cara dan alur penyusunan dokumen Renja PD sebagai berikut :

1. Mengacu pada rencana awal RKPD
2. Mengacu pada Renstra SKPD
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi
5. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

Keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.



Bagan Sinkronisasi RKPD Kabupaten Sidoarjo dengan Rencana Pembangunan Diatasnya



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemerintah pada Tahun anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesih Nomor 5234), sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 terrtang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);.
 12. Peraturan Presiden Nonror 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan- Mojokerto - Surabaya-Sidoarjo- Lamon gan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penrbahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara



- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara' Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Penrbangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Pererrcanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018



Ncmor' I Seri C);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);

1.3. Maksud dan Tujuan

1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jabon Tahun 2025

2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja PD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025. RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan
- 2) Terwujudnya Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan
- 3) Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan
- 4) Terciptanya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jabon Tahun 2021-2026 dan capaian kinerja tahun 2025, memuat antara lain :

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja / hasil keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kecamatan Jabon merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan program kegiatan kewilayahan. Untuk tahun anggaran 2025 Kecamatan Jabon melaksanakan program dan kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 5.601.864.700 (Lima Milyar Enam Ratus Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tersusun dalam table sebagai berikut :



				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian
												Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)			
				Urusan Pemerintahan Kecamatan									
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	95,65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	7 dokumen	3 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
					Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	6 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
				Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%



			Perangkat Daerah	sesuai keten								
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	6 dokumen	4 dokumen	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	17 orang	19 orang	19 orang	100%	17 orang	17 orang	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	0	0	0	0%	1 laporan	1 laporan	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	94,5%	85,9	91,5	91,5	100%	86,5	86,5	100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Jenis	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	31 Jenis	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7000 Liter	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4 Jenis	4 Paket	4 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%



			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 Jenis	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	0 dokumen	0%
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	26 Jenis	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	500 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	100%	350 Laporan	350 Laporan	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	5 unit	1 Jenis	5 unit	5 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	12 unit	5 unit	5 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%



			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	4 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71 unit	5 unit	30 unit	30 unit	100%	35 unit	35 unit	100%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	0	0	0%



1				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	82,61%	100%	100%	100%	100%	78,95%	78,95%	100%
					Prosentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standart	97,34%	73,33%	N/A	N/A	0%	96,53%	96,53%	100%
					Persentase desa yang mendapat pembinaan Lingkungan hidup, Usaha ekonomi dan PKL	100%	95,66%	96%	96%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	16 laporan	11 Laporan	13 laporan	13 laporan	100%	11 laporan	11 laporan	100%
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 laporan	11 kegiatan	25 laporan	25 laporan	100%	11 laporan	11 laporan	100%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti	8800	0	0	0	0%	8600 berkas	8600 berkas	100%



			Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan	0	0	0	0%	2 laporan	2 laporan	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang dilaksanakan	8 laporan	8 laporan	0	0	0%	4 laporan	4 laporan	100%
				Jumlah Laporan kegiatan pembinaan yang tersusun		3 laporan	0	0	0%	2 laporan	2 laporan	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang dilaksanakan	4 laporan	1 Kegiatan	0	0	0%	4 laporan	4 laporan	100%
				Jumlah Laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	0	0	0	0	0%	2 laporan	2 laporan	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 2 lantai luas maksimal 400m2 yang telah diberi saran	8 laporan	0	0	0	0%	0	0	0%



					teknis								
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pelanggaran perda dan perkara yang ditangani	90,91%	81,25%	83%	83%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Lembaga sosial, agama, dan masyarakat yang tersusun	13 laporan	6 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecama	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	1 kegiatan	0	0	0%	2 laporan	2 laporan	100%
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 laporan	5 kegiatan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran perda, dan perkara yang difasilitasi	7 permasalahan	3 permasalahan	0	0	0%	0	0	0%
				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Operasi penerapan dan penegakan perda yang dilaksanakan	4 laporan	36 kegiatan	0	0	0%	0	0	0%
					Jumlah permasalahan pelanggaran perda dan perkara yang terdaftar	4 laporan	3 permasalahan	0	0	0%	0	0	0%



			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	5 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	3 kegiatan	150 orang	150 orang	100%	200 orang	200 orang	100%
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 dokumen	0	0	0	0%	4 dokumen	4 dokumen	100%



Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jabon. Berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jabon.

Berikut tabel 2.2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Kecamatan Jabon sebagai berikut :



Tabel 2.2
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) KECAMATAN JABON

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai SAKIP			80,05	80,25	80,50	80,75	79,52	NA ^{*)}	80,00	80,00	Penilaian indeks RB tidak dilaksanakan sejak tahun 2023
2.	Nilai RB			27,22	27,22	28,5	28,5	-	NA ^{*)}	28,00	28,00	
3.	Nilai SKM			91,5	92,5	93,5	94,5	97,00	NA ^{*)}	93,00	93,00	
4.	Nilai IPP			4,20	4,25	4,30	4,35	3,73	NA ^{*)}	4,00	4,00	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka pelayanan kinerja Kecamatan Jabon memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi ;

- a. Unsur Pimpinan : Camat
Sekretaris
- b. Unsur Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Kasi Perekonomian
 2. Kasi Pemerintahan
 3. Kasi Pembangunan
 4. Kasi Kesejahteraan
 5. Kasi Ketenteraman dan ketertiban Umum

Jumlah Pegawai Kecamatan Jabon adalah 17 orang. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, bonus demografi, konektivitas antar wilayah yang semakin mudah, tantangan serta tuntutan kepada instansi pelayanan publik akan semakin kompleks. Oleh karena itu instansi pelayanan publik harus berbenah dan meningkatkan standar pelayanan. Tidak semua permasalahan dalam pelayanan publik diselesaikan dengan inovasi dalam bentuk. Beberapa permasalahan dapat diselesaikan dengan pembaruan Standar pelayanan, peningkatan jumlah personil, kompetensi SDM, serta penambahan jam pelayanan menyesuaikan dengan rutinitas keseharian masyarakat di sekitar.

Maka isu-isu strategis Kecamatan Jabon adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Sarana Prasarana dan Infrastruktur Penunjang Kinerja Aparatur
2. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur
3. Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan kepada Masyarakat
4. Belum Optimalnya Pemahaman Seluruh Aparatur Kecamatan Terkait Perencanaan dan Pelaporan
5. Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Daerah
6. Masih Kurangnya Pemahaman Aparatur Desa Terkait Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Kinerja, dan Keuangan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan



Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (*topdown – bottom up*).

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, oleh karena itu Kecamatan Jabon Tahun 2021-2026 untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berikut tabel 2.4 tujuan sasaran jangka menengah Kecamatan Jabon tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Kecamatan					Urusan Pemerintahan Umum					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sidoarjo	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	95,65	5.983.227.748	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Sidoarjo	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	95,65	5.983.227.748	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	7 dokumen 6 dokumen	104.976.425	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	7 dokumen 6 dokumen	104.976.425	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai keten	7 dokumen	68.750.415	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai keten	7 dokumen	68.750.415	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang	6 Laporan	1.234.065	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang	6 Laporan	1.234.065	



No	Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			disusun sesuai ketentuan								
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	20.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	20.000.000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data	14.991.945	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data	14.991.945	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	Persentase realisasi anggaran PD	91,58%	3.277.916.880	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	Persentase realisasi anggaran PD	91,58%	3.277.916.880	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidoarjo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	3.277.916.880	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidoarjo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	3.277.916.880	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	516.375	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	516.375	



No	Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	a. Persentase ASN yang disiplin b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	88 Persen 8 Persen	11.155.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	a. Persentase ASN yang disiplin b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat		11.155.500	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidoarjo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	11.155.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidoarjo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	11.155.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,5%	356.525.469	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,5%	356.525.469	
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sidoarjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.636.355	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sidoarjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.636.355	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidoarjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	47.437.461	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidoarjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	47.437.461	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sidoarjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	89.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sidoarjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	89.600.000	



No	Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sidoarjo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.454.604	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sidoarjo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.454.604	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Sidoarjo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	14.442.166	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Sidoarjo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	14.442.166	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	51.687.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	51.687.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	128.267.383	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	128.267.383	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah BMD yang diadakan	7 Jenis	40.346.290	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah BMD yang diadakan	7 Jenis	40.346.290	
	Pengadaan Mebel	Kab. Sidoarjo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	22.662.870	Pengadaan Mebel	Kab. Sidoarjo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	22.662.870	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidoarjo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	17.683.420	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidoarjo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	17.683.420	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidoarjo	Presentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	801.898.495	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidoarjo	Presentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	801.898.495	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	126.316.495	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	126.316.495	



No	Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Daya Air dan Listrik		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Daya Air dan Listrik		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	675.582.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	675.582.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidoarjo	Presentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	537.236.912	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidoarjo	Presentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	537.236.912	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidoarjo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	28.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidoarjo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	28.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidoarjo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	12.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidoarjo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	12.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sidoarjo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sidoarjo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidoarjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidoarjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	50.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidoarjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	436.736.912	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidoarjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	436.736.912	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Sidoarjo	Prosentase Izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan Prosentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standart Persentase desa yang mendapat pembinaan Lingkungan hidup, Usaha ekonomi dan PKL	82,61 % 97,34 % 100%	299.933.150	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Sidoarjo	Prosentase Izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan Prosentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standart Persentase desa yang mendapat pembinaan Lingkungan hidup, Usaha ekonomi dan PKL	82,61 % 97,34 % 100%	299.933.150	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan hasil koordinasi bidang	12 Laporan	84.097.450	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan hasil koordinasi bidang	12 Laporan	84.097.450	



No	Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan ; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	84.097.450	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	84.097.450	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Sidoarjo	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100%	6.969.350	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Sidoarjo	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100%	6.969.350	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	3 laporan	6.969.350	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	3 laporan	6.969.350	



No	Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Kecamatan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan kegiatan pembinaan yang tersusun a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan Jumlah Laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang dilaksanakan	4 Laporan 0 Berkas 8 Laporan	208.866.350	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan kegiatan pembinaan yang tersusun a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan Jumlah Laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan ; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang	4 Laporan 0 Berkas 8 Laporan	208.866.350	



No	Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
								dilaksanakan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	208.866.350	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	208.866.350	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Sidoarjo	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	51.985.325	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Sidoarjo	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	51.985.325	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sidoarjo	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan Lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang tersusun	12 Laporan	50.460.325	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sidoarjo	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan Lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang tersusun	12 Laporan	50.460.325	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2.625.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2.625.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan	4 Laporan	47.835.325	Harmonisasi Hubungan dengan	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan	4 Laporan	47.835.325	



No	Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	dan Tokoh Masyarakat		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Tokoh Agamadan Tokoh Masyarakat		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah permasalahan pelanggaran perda, dan perkada yang difasilitasi	8 Permasalahan	1.525.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah permasalahan pelanggaran perda, dan perkada yang difasilitasi	8 Permasalahan	1.525.000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1.525.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Sidoarjo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1.525.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Sidoarjo	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	107.402.850	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Sidoarjo	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	107.402.850	



No	Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			dengan baik					dengan baik			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	5 Kegiatan	107.402.850	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah kegiatan penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	5 Kegiatan	107.402.850	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Sidoarjo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	44.986.500	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Sidoarjo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	44.986.500	



No	Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan	Kab. Sidoarjo	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	62.416.350	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan	Kab. Sidoarjo	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	62.416.350	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Sidoarjo	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	12.487.404	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Sidoarjo	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	12.487.404	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Kab. Sidoarjo	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	13 Desa	12.487.404	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Kab. Sidoarjo	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	13 Desa	12.487.404	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	12.487.404	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	12.487.404	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Merupakan forum strategis yang melibatkan semua pelaku pembangunan di Kabupaten Sidoarjo baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat yang berkepentingan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Kegiatan dimulai dengan pelaksanaan musrenbang di tingkat desa / kelurahan, Musrebang Kecamatan, musrenbang Kabupaten dan diteruskan dengan musrenbang provinsi sampai musrenbang nasional. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten Sidoarjo untuk 2025 dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, forum perangkat daerah menggunakan aplikasi berbasis online.

Usulan program dan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi terkait kebutuhan serta harapan *stakeholder* terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas pokok fungsi dan pelimpahan kewenangan kepada perangkat daerah Pada tahun 2025.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Sidoarjo

Nama OPD : Kecamatan Jabon

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Urusan Pemerintahan Kecamatan					
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Kab. Sidoarjo	95,65	5.983.227.748	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Sidoarjo	7 dokumen 6 dokumen	104.976.425	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai	Kab. Sidoarjo	7 dokumen	68.750.415	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
		keten				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Sidoarjo	6 Laporan	1.234.065	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daera	Kab. Sidoarjo	1 dokumen	20.000.000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	1 data	14.991.945	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	Kab. Sidoarjo	91,58%	3.277.916.880	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidoarjo	17 orang/bulan	3.277.916.880	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidoarjo	1 laporan	516.375	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Persentase ASN yang disiplin b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	Kab. Sidoarjo	88 Persen 8 Persen	11.155.500	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sidoarjo	40 Paket	11.155.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Sidoarjo	93,5%	356.525.469	
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidoarjo	4 Paket	8.636.355	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidoarjo	4 Paket	47.437.461	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sidoarjo	12 Paket	89.600.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sidoarjo	2 Paket	16.454.604	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sidoarjo	4 Paket	14.442.166	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidoarjo	12 Laporan	51.687.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidoarjo	400 Laporan	128.267.383	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Kab. Sidoarjo	7 Jenis	40.346.290	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sidoarjo	4 Unit	22.662.870	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidoarjo	8 Unit	17.683.420	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Kab. Sidoarjo	100%	801.898.495	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidoarjo	12 Laporan	126.316.495	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidoarjo	12 Laporan	675.582.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kab. Sidoarjo	100%	537.236.912	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidoarjo	2 Unit	28.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidoarjo	3 Unit	12.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Sidoarjo	5 Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sidoarjo	24 Unit	50.000.000	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidoarjo	1 Unit	436.736.912	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan Prosentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standart Persentase desa yang mendapat pembinaan Lingkungan hidup, Usaha ekonomi dan PKL	Kab. Sidoarjo	82,61 % 97,34 % 100%	299.933.150	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Kab. Sidoarjo	12 Laporan	84.097.450	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Sidoarjo	7 Laporan	84.097.450	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti	Kab. Sidoarjo	100%	6.969.350	
	Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Sidoarjo	3 laporan	6.969.350	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan kegiatan pembinaan yang tersusun a.	Kab. Sidoarjo	4 Laporan	208.866.350	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
		Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan Jumlah Laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang dilaksanakan		0 Berkas 8 Laporan		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Sidoarjo	4 Laporan	208.866.350	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Kab. Sidoarjo	100%	51.985.325	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang tersusun	Kab. Sidoarjo	12 Laporan	50.460.325	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Sidoarjo	4 Laporan	2.625.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Sidoarjo	4 Laporan	47.835.325	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran perda, dan perkada yang difasilitasi	Kab. Sidoarjo	8 Permasalahan	1.525.000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	Kab. Sidoarjo	1 Laporan	1.525.000	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
	Republik Indonesia	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Kab. Sidoarjo	100%	107.402.850	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Sidoarjo	400 Orang	44.986.500	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sidoarjo	2 Dokumen	62.416.350	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Kab. Sidoarjo	100%	12.487.404	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Kab. Sidoarjo	13 Desa	12.487.404	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Sidoarjo	13 Dokumen	12.487.404	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Reformasi perencanaan dan penganggaran diawali dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan perundang-undangan tersebut telah dilengkapi dengan PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), PP Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP Nomor 40/2006 tentang cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang berbasis Kinerja, berjangka menengah dan sistem penganggaran terpadu. Agar penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Anggaran Berbasis Kinerja, dan Anggaran Terpadu dapat dioptimalkan, maka diperlukan suatu upaya untuk menata kembali struktur program dan Kegiatan (restrukturisasi program dan kegiatan).

Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada hasil (outcome) dan keluaran (output). Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil (outcome) dan keluaran (output), serta berbasis pada tugas dan fungsi SKPD atau unit kerja, maka Bappeda Kabupaten Sidoarjo telah menyusun konsep restrukturisasi program dan kegiatan SKPD. Hasil Restrukturisasi ini akan menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sidoarjo yang diterapkan mulai Tahun 2016, bersama dengan RPJMD baru Tahun 2021-2026 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo telah menentukan arah kebijakan yang akan di ambil. Kebijakan tersebut mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang merupakan prioritas untuk melaksanakan program kerja Kecamatan Jabon :

- a. Mengembangkan Kualitas Pelayanan Melalui inovasi pelayanan masyarakat yang berbasis kearifan lokal, Penerapan Standart Pelayanan dan Pemahaman Masyarakat terkait Prosedur pelayanan;
- b. Mewujudkan Efektifitas Tata Kelola Organisasi melalui Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Administrasi Perkantoran ;
- c. Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Organisasi Melalui peningkatan



Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Organisasi ;

- d. Mendorong Kemandirian dan Kelembagaan Pemerintahan Desa melalui peningkatan Koordinasi antar pemerintah dan pihak terkait, Pendampingan, monitoring dan evaluasi terkait Pembangunan dan Pemerintahan .

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai Misi, Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan tujuan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum”**

Dalam rangka mencapai tujuan ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- b. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan berdasarkan hasil restrukturasi terdapat 5 Program, 14 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan pada Kecamatan Jabon dengan pagu sebesar Rp. 4.680.253.808,- (Empat Milyard Enam Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah), antara lain :

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN /KOTA**

**A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah**

- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- 4. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

C. Administraasi Kepegawaian Perangkat Darah

- 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Bahan/Materia
8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Mebel
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

C. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan



2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

B. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Jabon Tahun 2025 diperlukan rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan. Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Jabon Tahun 2025 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain :

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan urusan pemerintahan Kecamatan;
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan Kecamatan Jabon dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 –2026 dan hasil review Rencana Strategis Kecamatan Jabon Tahun 2025;
- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan;

Secara garis besar rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jabon Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jabon Tahun 2025 merupakan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses pelayanan di Kecamatan Jabon;
- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program di Kecamatan Jabon;
- 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sebanyak 14 kegiatan di Kecamatan Jabon;
- 4) Kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Kecamatan Jabon Tahun 2025 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sidoarjo, Program dan kegiatan Renja Kecamatan Jabon Tahun 2025 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana Table berikut :



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : Kecamatan Jabon

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan
--

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Kecamatan Jabon														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Rp. 299.933.150,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 299.933.150,00	Rp. 827.135.847,19	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Rp. 84.097.450,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 84.097.450,00	Rp. 745.761.056,25	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidoarjo, Jabon, Dukuhsari	Rp. 84.097.450,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 84.097.450,00	Rp. 745.761.056,25	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			Rp. 6.969.350,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.969.350,00	Rp. 71.621.805,94	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Dukuhsari	Rp. 6.969.350,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.969.350,00	Rp. 71.621.805,94	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Rp. 208.866.350,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 208.866.350,00	Rp. 9.752.985,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Dukuhsari	Rp. 208.866.350,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 208.866.350,00	Rp. 9.752.985,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Rp. 51.985.325,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 51.985.325,00	Rp. 141.527.397,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Rp. 50.460.325,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 50.460.325,00	Rp. 125.027.397,00	



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jabon

2025

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 2.625.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.625.000,00	Rp. 92.229.192,00
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 47.835.325,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 47.835.325,00	Rp. 32.798.205,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				Rp. 1.525.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.525.000,00	Rp. 16.500.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 1.525.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.525.000,00	Rp. 16.500.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 107.402.850,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 107.402.850,00	Rp. 368.984.712,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp. 107.402.850,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 107.402.850,00	Rp. 368.984.712,00
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Dukuhsari		Rp. 44.986.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 44.986.500,00	Rp. 303.984.712,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Dukuhsari		Rp. 62.416.350,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 62.416.350,00	Rp. 65.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 12.487.404,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 12.487.404,00	Rp. 231.261.634,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 12.487.404,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 12.487.404,00	Rp. 231.261.634,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Dukuhsari		Rp. 12.487.404,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.487.404,00	Rp. 231.261.634,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 4.702.080.769,00	Rp. 427.975.202,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.130.055.971,00	Rp. 9.126.034.476,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 104.976.425,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 104.976.425,00	Rp. 133.897.909,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 68.750.415,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 68.750.415,00	Rp. 64.625.456,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 1.234.065,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.234.065,00	Rp. 2.281.313,00



Rencana Kerja (RENJA)
Kecamatan Jabon

2025

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.000.000,00	Rp. 50.500.000,00
7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 14.991.945,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.991.945,00	Rp. 16.491.140,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 3.277.916.880,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.277.916.880,00	Rp. 5.839.618.439,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 3.277.400.505,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.277.400.505,00	Rp. 5.832.774.501,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 516.375,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 516.375,00	Rp. 6.843.938,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 11.155.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 11.155.500,00	Rp. 29.900.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 11.155.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.155.500,00	Rp. 29.900.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 356.525.469,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 356.525.469,00	Rp. 580.203.750,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 8.636.355,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 8.636.355,00	Rp. 16.531.250,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 47.437.461,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 47.437.461,00	Rp. 54.450.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 89.600.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 89.600.000,00	Rp. 166.750.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Dukuh Sari Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 16.454.604,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.454.604,00	Rp. 21.160.000,00
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 14.442.166,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.442.166,00	Rp. 19.837.500,00



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 51.687.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 51.687.500,00	Rp. 23.750.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 128.267.383,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 128.267.383,00	Rp. 277.725.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 10.000.000,00	Rp. 30.346.290,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 40.346.290,00	Rp. 473.389.050,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 22.662.870,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 22.662.870,00	Rp. 125.274.981,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000,00	Rp. 7.683.420,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 17.683.420,00	Rp. 348.114.069,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 801.898.495,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 801.898.495,00	Rp. 1.396.224.725,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 126.316.495,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 126.316.495,00	Rp. 446.224.725,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 675.582.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 675.582.000,00	Rp. 950.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 139.608.000,00	Rp. 397.628.912,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 537.236.912,00	Rp. 672.800.603,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 28.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 28.500.000,00	Rp. 50.600.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 12.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.000.000,00	Rp. 45.540.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 30.250.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 66.000.000,00



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Jabon, Dukuhsari		Rp. 39.108.000,00	Rp. 397.628.912,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 436.736.912,00	Rp. 480.410.603,00
Jumlah									Rp. 5.173.889.498,00	Rp. 427.975.202,00			Rp. 5.601.864.700,00	Rp. 10.694.944.066,19
								Kab. Sidoarjo,..... Camat Jabon						
								ISWADI PRIBADI, S.Sos,M.MT NIP. 197012081992011002						



BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jabon Tahun 2025 ini merupakan hasil restrukturisasi Program dan Kegiatan yang akan menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sidoarjo. Restrukturisasi dimulai di Tahun 2016, sedangkan pemutakhiran program, kegiatan dan sub kegiatan dimulai tahun 2021 bersama dengan RPJMD baru Tahun 2021-2026, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Jabon 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Jabon sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Jabon Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Demikian rencana kerja ini diusulkan untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 10 Juli 2024
CAMAT JABON



Ditandatangani secara elektronik oleh

ISWADI PRIBADI, S.Sos, M.MT.
NIP. 197012081992011002

ISWADI PRIBADI, S.Sos, M.MT
Pembina Tk I / IV b
NIP.197012081992011002



LAMPIRAN